

### FORM INVENTARISASI HASIL KELITBANGAN

1	Judul Hasil Kelitbangan	:	Kajian Potensi Pengembangan Agrowisata Berbasis Hortikultura Tahun 2022
2	Abstrak	:	Agrowisata hortikultura adalah suatu bentuk kegiatan wisata yang semakin populer di kalangan masyarakat luas. Agrowisata hortikultura di Daerah Istimewa Yogyakarta direncanakan sebagai wadah wisata agro yang beredukasi serta tidak meninggalkan pengertian pokok dari agrowisata yang mencakup atas tanam-petik-jual yang disuguhkan. Kawasan hortikultura dan agrowisata untuk dikembangkan menjadi kawasan agrowisata berbasis hortikultura yang terdiri atas 43 lokasi agrowisata berbasis hortikultura.
3	Kata Kunci	:	agrowisata, hortikultura
4	Penyusun	:	Bidang Hortikultura, DPKP DIY
5	Kontak	:	(0274) 588938
6	Sumber Dana	:	APBD
7	Anggaran	:	Rp100.000.000,-
8	Permasalahan pokok yang dibahas dalam kelitbangan	:	Hortikultura merupakan salah satu sektor pertanian yang memiliki potensi strategis karena output dari produk hortikultura merupakan komoditas yang banyak menjadi kebutuhan masyarakat. Disamping untuk dimanfaatkan produknya, tanaman hortikultura memiliki potensi untuk dikembangkan di sektor pariwisata, khususnya agrowisata.
9	Alasan atau latar belakang dilakukannya kelitbangan	:	Dalam upaya mengantisipasi ketimpangan wilayah dan mengembangkan wilayah pedesaan, pemerintah mulai menggiatkan pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan, antara lain pengembangan agribisnis pedesaan dan program agrowisata pedesaan. Pengembangan agribisnis pedesaan dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan petani. agrowisata merupakan salah satu alternatif pengembangan pertanian di pedesaan, dengan dilatarbelakangi adanya beberapa kendala pengembangan sektor pertanian skala besar, dan potensi wilayah pedesaan yang menarik bagi wisatawan.
10	Bagaimana kelitbangan dilakukan dan metode yang digunakan dalam kelitbangan	:	Kajian dilakukan dengan metode survey secara <i>purposive sampling</i> baik dengan kuesioner maupun wawancara.
11	Pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan (hasil) serta prospeknya	:	Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki aset dan potensi Kawasan hortikultura dan agrowisata untuk dikembangkan menjadi kawasan agrowisata berbasis hortikultura yang terdiri atas 43 lokasi agrowisata berbasis hortikultura dengan rincian 14 lokasi di wilayah Sleman, 9 lokasi di wilayah Bantul, 6 lokasi di wilayah Kulon Progo, 9 lokasi di wilayah Gunung Kidul dan 5 lokasi di wilayah kota Yogyakarta.
12	Rekomendasi Hasil	:	Kajian ini memberikan gambaran yang terpadu terkait pengembangan potensi hortikultura di

		<p>sektor pariwisata. Beberapa rekomendasi dari hasil kajian ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata niaga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan regulasi, pedoman, persyaratan, pedoman dan prosedur terkait agrowisata berbasis hortikultura;</li> <li>• Penyusunan sistem informasi potensi agrowisata berbasis hortikultura Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>• Harmonisasi strategi hortikultura di sektor pertanian dan pariwisata</li> </ul> </li> <li>2. Tata Kelola <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pengelolaan destinasi agrowisata</li> <li>• Memperkuat kerjasama antara sektor pertanian dan sektor pariwisata dalam upaya pengembangan agrowisata berbasis hortikultura</li> <li>• Memperkuat kerjasama multipihak penta helix (pemerintah, akademisi, badan usaha, masyarakat, dan media)</li> <li>• Pengembangan desa wisata sebagai alternatif lembaga pengelola agrowisata berbasis hortikultura</li> <li>• Promosi agrowisata hortikultura</li> </ul> </li> <li>3. Tata ruang agrowisata <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan tata ruang agrowisata berbasis hortikultura</li> <li>• Keterpaduan tata ruang agrowisata berbasis hortikultura dengan kebijakan pertanian dan pariwisata strategis</li> </ul> </li> <li>4. Tata nilai <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksplorasi potensi aspek sosial budaya masyarakat lokal sebagai produk agrowisata hortikultura</li> <li>• Eksplorasi kegiatan budidaya hortikultura sebagai produk agrowisata</li> <li>• Eksplorasi atraksi lokal terkait budidaya hortikultura</li> <li>• Penerapan teknologi sebagai pendukung peningkatan nilai tambah produk agrowisata berbasis hortikultura</li> <li>• Pengembangan Brand development, brand awareness agrowisata</li> </ul> </li> <li>5. Tata lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan aksesabilitas, infrastruktur dan amenity destinasi wisata</li> <li>• Pengembangan keunikan lingkungan destinasi agrowisata</li> <li>• Pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan agrowisata hortikultura</li> </ul> </li> </ol>
13	Tindak lanjut hasil	: Merumuskan strategi, program dan kegiatan dalam pengembangan kawasan agrowisata di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan komoditas hortikultura.

1	Judul Hasil Kelitbangan	:	Kajian <i>Food Waste</i>
2	Abstrak	:	<i>Food Loss and Waste</i> atau sering disingkat FLW dapat disebut sebagai “sampah makanan”. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) Tahun 2019, banyak pengertian dari keduanya namun dimaknai sebagai penurunan pada kuantitas (jumlah) atau kualitas dari makanan sepanjang <i>food supply chain</i> atau rantai persediaan makanan. Kuantitatif FLW didefinisikan sebagai hilangnya jumlah atau kondisi fisik dari makanan itu sendiri, dan kualitatif adalah hilangnya komponen makanan seperti nilai gizi dan atau nilai ekonomi yang berdampak pada makanan yang tidak aman dan berisiko pada kesehatan konsumen (Food and Agriculture Organization, 2019). Hal yang tidak dapat disebut FLW termasuk pengalihan fungsi makanan untuk ternak, pengalihan fungsi makanan untuk nilai ekonomi yang lain, dan bagian makanan yang tidak dapat dimakan seperti kulit, biji, dan sebagainya. Total <i>Food Waste</i> pada Kelompok Rumah Tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 412.000.550,304 kg/tahun atau sebanyak 412.000,55 ton/tahun. Total <i>Food Waste</i> di Kelompok Non Rumah Tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 3.958.428,084 kg/tahun atau sebanyak 3.958,43 ton/tahun. Sehingga diperoleh Total Keseluruhan <i>Food Waste</i> pada Kelompok Rumah Tangga dan Non Rumah Tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 415.958.978,388 kg/tahun atau sebanyak 415.958,98 ton/tahun.
3	Kata Kunci	:	<i>Food Loss, Food Waste, FLW</i>
4	Penyusun	:	DPKP DIY
5	Kontak	:	(0274) 588938
6	Sumber Dana	:	APBD
7	Anggaran	:	Rp 80.000.000,-
8	Permasalahan pokok yang dibahas dalam kelitbangan	:	<i>Food Waste</i> sebagai penurunan kuantitas atau kualitas yang berasal dari retail, penyelenggara makanan (restoran, catering, hotel, dan sebagainya), juga konsumen.
9	Alasan atau latar belakang dilakukannya kelitbangan	:	Secara umum kajian ini ditujukan untuk menginventarisasi data dan informasi serta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai masukan utama untuk menyusun strategi pengendalian food loss dan food waste, dalam rangka menekan angka kebutuhan pangan dan mendukung ketahanan.
10	Bagaimana kelitbangan dilakukan dan metode yang digunakan dalam kelitbangan	:	Metode studi yang digunakan adalah studi deskriptif analisis. Teknis pengumpulan data dilakukan melalui survey instansional (data sekunder) dan survei lapangan (data primer)
11	Pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan (hasil) serta prospeknya	:	Analisis dalam survey ini ada 2 kelompok yang dilakukan survey di lapangan, yaitu Kelompok Rumah Tangga (RT) dan Kelompok Non Rumah Tangga (Non – RT), dimana kelompok non rumah tangga meliputi : Rumah

		Makan (Restoran, Rumah Makan, Warung Makan dan Kaki lima/pinggiran/lesehan), Hotel (dikhususkan pada Hotel Bintang), Rumah Sakit, Distributor dan Pasar.
12	Rekomendasi Hasil	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akademisi / PT           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat konsep, platform penanganan FLW.</li> <li>• Riset, pelatihan dan pendampingan penurunan FLW.</li> <li>• Mengembangkan teknologi penanganan dan keamanan pangan FLW.</li> <li>• Mengedukasi masyarakat dan capacity building mengenai isu FLW</li> <li>• Pengembangan konsep dan implementasi system penanganan FLW berbasis pentahelix dengan pendekatan inter, antar dan trans disiplin.</li> <li>• Model penanganan dan penurunan FLW.</li> </ul> </li> <li>2. Pemerintahan           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulator, kontroller, koordinasi dan sanksi.</li> <li>• Menindaklanjuti Instruksi Gubernur tentang FLW.</li> <li>• Pelatihan, pendampingan dan pembuatan demplot Food Waste melibatkan semua stakeholder.</li> <li>• Mengoptimalkan Dana Keistimewaan.</li> <li>• Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Model Pengelolaan Food Waste.</li> </ul> </li> <li>3. Dunia Usaha           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor penggerak berbasis IT, Teknologi dan SDM Kompeten.</li> <li>• Memiliki konsep pengolahan sampah berbasis 3 R, yakni: <i>reduce</i>, <i>reuse</i> dan <i>recycle</i>.</li> <li>• Teknologi penanganan FLW berbasis fermentasi, kompositing dan biogasifikasi berbasis thermal pirolisis, berbasis mekanik, seperti pengeringan, pencacahan, penepungan, dan peletisasi.</li> <li>• Memahami tanggal kadaluwarsa dan tanggal produksi, penyimpanan yang tepat, lebih banyak umur simpan dan lebih banyak waktu untuk menggunakan.</li> <li>• Retail dan grosir selalu melakukan evaluasi, overstocking pada retail dan grosir, sehingga perlu selalu di evaluasi produk-produk yang banyak dibeli di masyarakat sekitar (evaluasi sisa).</li> </ul> </li> <li>4. Masyarakat / LSM           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman midfull eating (perilaku).</li> <li>• Edukasi perencanaan makan dengan baik, tentukan resep mana yang akan dimasak, dan menghabiskan makanan yang disajikan.</li> </ul> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akselerator, penggerak, penghubung, provokator, mempromosikan.</li> <li>• Pengelohan sampah tingkat rumah tangga dengan membuat kompos sejak dini untuk warung hidup, prakarya dari cangkang telur, dan lain-lain.</li> </ul> <p>5. Media</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi, promosi, publikasi.</li> <li>• Perubahan sosial.</li> <li>• Poster dipasang pada restoran, rumah makan, kantin, kafe, perusahaan jasa boga, hotel dan lain-lain.</li> <li>• Gerakan dan kampanye ke semua pihak, dinas-dinas terkait, guru-guru SD, SMP, SMA, penggerak PKK, dasawisma, forum agama (pengajian), dan lain-lain.</li> <li>• Dengan sosialisasi yang masif dapat mengurangi banyaknya limbah pangan atau pangan terbuang sia-sia, sehingga dapat mendukung program memperkuat ketahanan pangan nasional.</li> </ul>
13	Tindak lanjut hasil	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengubah sampah menjadi energi Biogas dan listrik.</li> <li>2. Membuat Prototipe aplikasi jual beli sampah/Bank Sampah.</li> <li>3. Bekerjasama dengan <i>Foodbank Of Indonesia</i> (FOI) untuk pemanfaatan <i>Food Waste</i> dan mencari sumber-sumber Food Waste.</li> <li>4. Membuat Cabang FOI di Daerah Istimewa Yogyakarta atau menumbuhkan LSM-LSM untuk membantu mengatasi kesenjangan pangan di masyarakat (jembatan antara masyarakat yang berlebihan makanan dengan yang membutuhkan)</li> </ol>

1	Judul Hasil Kelitbangan	:	Kajian Optimalisasi Usaha Perkebunan Tembakau di DIY
2	Abstrak	:	Keterbatasan lahan perkebunan tembakau menyebabkan skala usahatani kecil menjadi tidak efisien sehingga pendapatan petani rendah. Salah satu upaya pengembangan tanaman tembakau adalah melalui pola kemitraan dalam hal pembinaan dan pemasaran daun tembakau basah maupun kering, untuk menjamin pasar tembakau pada saat panen. Dalam kajian Optimalisasi Usaha Perkebunan Tembakau di DIY, arah tujuan dari kegiatan ini adalah terkait dengan kerja sama antara PT. Taru Martani dengan petani tembakau di DIY.
3	Kata Kunci	:	Optimalisasi usaha, perkebunan, tembakau
4	Penyusun	:	Bidang Perkebunan, DPKP DIY
5	Kontak	:	(0274) 588938
6	Sumber Dana	:	APBD
7	Anggaran	:	Rp100.000.000,-
8	Permasalahan pokok yang dibahas dalam kelitbangan	:	Munculnya hambatan dan permasalahan yang menggaggu dalam proses optimalisasi produksi tembakau
9	Alasan atau latar belakang dilakukannya kelitbangan	:	Maksud dari kegiatan Kajian Optimalisasi Usaha Perkebunan Tembakau di DIY adalah memberikan arahan terkait konsep pengembangan produksi tembakau yang dapat menjadi ciri khas produk andalan di DIY, khususnya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam mengembangkan konsep tersebut
10	Bagaimana kelitbangan dilakukan dan metode yang digunakan dalam kelitbangan	:	Pendekatan kajian ini menggunakan pendekatan teori tentang kemitraan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif rasionalistik. Metode kualitatif ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.
11	Pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan (hasil) serta prospeknya	:	Kerja sama dan kemitraan antara PT. Taru Martani dengan petani tembakau di DIY.
12	Rekomendasi Hasil	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dibuat peraturan kepala daerah terkait dengan tembakau untuk memberikan perlindungan terhadap petani dan pelaku usaha hasil tembakau.</li> <li>2. Perlunya ada konsolidasi antara pemerintah daerah dengan pihak industry pengolahan tembakau dalam pembinaan dan pendampingan petani tembakau untuk dapat membudidayakan tembakau sesuai dengan grade bahan baku yang dibutuhkan oleh industri, sehingga ada jaminan pasar dari industri untuk membeli hasil panen petani tembakau setiap musim tanamnya.</li> <li>3. Perlu ada pengembangan teknologi tepat guna yang dapat meminimalisir biaya produksi dan meningkatkan kualitas hasil panen tembakau.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Perlu adanya bantuan pengadaan teknologi pasca panen di setiap kabupaten yang memiliki sentra budidaya tembakau untuk meningkatkan kualitas produk tembakau.</li> <li>5. Untuk memperluas pasar dan meningkatkan pengetahuan serta skill petani tembakau di DIY maka perlu adanya jalinan kerja sama antar daerah/ provinsi dalam pengembangan budidaya tembakau. Dengan adanya jalinan kerja sama ini dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dan teknologi pengolahan tembakau.</li> <li>6. Dinas pertanian kabupaten perlu menyusun road map pengembangan budidaya tembakau di masing-masing daerahnya guna untuk mensinkronkan program dan kegiatan dari dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.</li> </ol>
13	Tindak lanjut hasil	: Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY Dengan Mitra PT. Taru Martani dan Petani Tembakau tentang Kerja Sama Optimalisasi Budidaya Tembakau di DIY

1	Judul Hasil Kelitbangan	:	Kajian Penyusunan Insentif dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2	Abstrak	:	Ketersediaan lahan di bidang pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang terjadi secara terus menerus dan tidak diimbangi dengan adanya penciptaan lahan pertanian baru, dapat mengakibatkan pada ancaman krisis lahan pertanian pangan. Upaya perlindungan LP2B dilakukan melalui pembentukan kawasan (KP2B) yang akan terdiri dari LP2B dan LCP2B dan berbagai unsur pendukungnya.
3	Kata Kunci	:	Insentif, LP2B
4	Penyusun	:	DPKP DIY
5	Kontak	:	(0274) 588938
6	Sumber Dana	:	APBD
7	Anggaran	:	Rp 100.000.000,-
8	Permasalahan pokok yang dibahas dalam kelitbangan	:	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai amanat dari pasal 26 dan pasal 53 peraturan tersebut perlu dukungan konkrit dan operasional berupa insentif ekonomi dan aspek kelembagaan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah/Perda. Jenis insentif ekonomi dan kelembagaan penunjangnya harus secara langsung terkait dengan aktivitas usahatani di Kawasan pertanian, sehingga akan menstimulir para petani/pelaku usaha pertanian untuk tetap berusaha dan meningkatkan kapasitas produksi pertaniannya.
9	Alasan atau latar belakang dilakukannya kelitbangan	:	Mengingat pentingnya insentif ekonomi dan aspek kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang PLP2B, maka perlu dikaji dan diformulasikan secara seksama bentuk insentif ekonomi yang operasional dan aspek kelembagaan penunjang yang dipandang efektif.
10	Bagaimana kelitbangan dilakukan dan metode yang digunakan dalam kelitbangan	:	Metode survei dipilih dengan dukungan data sekunder dan data primer.
11	Pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan (hasil) serta prospeknya	:	Konsep pembiayaan yang diberikan kepada petani pada Kawasan LP2B berdasar pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada di DIY. Tujuan Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
12	Rekomendasi Hasil	:	Pemerintah DIY dapat menerapkan pemberian insentif di lahan sawah LP2B melalui kegiatan:

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian lahan sawah yang dijual pemiliknya;</li> <li>2. Pemberian insentif kepada produsen dan pemakai pupuk organik, benih lokal, pestisida hayati;</li> <li>3. Terciptanya hubungan petani dan kelompok tani dengan akademisi dan instansi dalam upaya pengembangan benih berkualitas berbasis dari benih lokal pada tiap kawasan LP2B dan adanya pengarahannya dari sisi on farm dan off farm;</li> <li>4. Memberikan peralatan produksi pupuk kepada produsen pupuk organik;</li> <li>5. Mengembangkan jalan usaha tani dengan dimensi tertentu yang hanya untuk memberikan akses produksi pertanian;</li> <li>6. Mengembangkan sarana dan prasarana irigasi utk perikanan di lokasi dengan sumber air kontinyu;</li> <li>7. Peningkatan kualitas jaringan irigasi;</li> <li>8. Melakukan konservasi mata air dengan menanam pepohon di areal penyangga mata air;</li> <li>9. Memberikan layanan informasi untuk penjualan produk pertanian dan jaminan harga pasar;</li> <li>10. Melibatkan semua Dinas terkait dalam tata kelola lahan LP2B;</li> <li>11. Memberikan perlindungan hukum kawasan LP2B pada tiap</li> <li>12. Kabupaten dalam upaya menjaga keberlangsungan produksi dari ancaman perubahan penggunaan lahan LP2B;</li> <li>13. Memberikan apresiasi dalam bentuk insentif kepada petani dan keluarga petani seperti diatur dalam Draft Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif LP2B</li> </ol>
13	Tindak lanjut hasil	: Upaya pemberian insentif diberikan berdasarkan LP2B yaitu: kemudahan memperoleh saprodi, peningkatan produksi pupuk dan pestisida organik, peningkatan kualitas system irigasi jalan usahatani, sistem informasi dan pendampingan di tingkat on farm dan off farm, jaminan kesejahteraan petani, ganti rugi akibat gagal panen dan jaminan harga panen

1	Judul Hasil Kelitbangan	:	Kajian Desa Mandiri Benih Berbasis Budaya Lokal
2	Abstrak	:	Keanekaragaman hayati khususnya dalam sektor pangan, hortikultura, dan perkebunan di wilayah DIY saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil Analisis LQ mengindikasikan bahwa sebagian besar tanaman komoditas terpilih di semua wilayah adalah basis atau unggul jika memiliki LQ lebih dari satu ( $LQ > 1$ ) sehingga komoditas tersebut menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan, memiliki keunggulan komparatif, dan hasilnya tidak saja memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.
3	Kata Kunci	:	Desa Mandiri Benih, LQ, <i>roadmap</i>
4	Penyusun	:	DPKP DIY
5	Kontak	:	(0274) 588938
6	Sumber Dana	:	APBD
7	Anggaran	:	Rp 100.000.000,-
8	Permasalahan pokok yang dibahas dalam kelitbangan	:	Industri benih lokal sampai sekarang ini hanya sebatas sebagai produsen benih, belum sebagai industri benih. Industri benih lokal belum mampu menguasai seluruh sub sistem dalam perbenihan. Untuk mengidentifikasi suatu sektor atau subsektor ekonomi potensial dan bukan potensial digunakan alat analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).
9	Alasan atau latar belakang dilakukannya kelitbangan	:	Kajian Desa Mandiri Benih Berbasis Budaya Lokal” akan menghasilkan rumusan untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri Benih (DMB) yang bertujuan pemberdayaan pelaku usahatani di tingkat desa agar memperoleh nilai kebermanfaatn dan peningkatan nilai ekonomi berlandaskan kearifan lokal, khususnya terkait komoditas pangan, hortikultura, dan perkebunan
10	Bagaimana kelitbangan dilakukan dan metode yang digunakan dalam kelitbangan	:	Pemetaan kondisi eksisting diperoleh melalui data primer ( <i>indepth-interview</i> dan observasi) dan data sekunder (kajian studi literatur)
11	Pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan (hasil) serta prospeknya	:	<i>Logical framework</i> kajian ini akan menghasilkan keluaran berupa roadmap pengembangan Desa Mandiri Benih (DMB), analisis kelayakan, dan strategi pengembangan benih berlandaskan kearifan lokal ( <i>local wisdom</i> ) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
12	Rekomendasi Hasil	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun strategi dan program dalam pengelolaan baik on farm dan off farm benih lokal berbasis budaya dalam konsep Desa Mandiri Benih (DMB) sehingga mempunyai daya saing yang kuat.</li> </ul>